

Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia

Dwi Rahayu Hidayati^{1✉}, Niniek Imaningsih²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Abstrak

Salah satu komponen penting dari kualitas pembangunan ekonomi yaitu tingkat pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010-2021. Data sekunder dalam bentuk data *time series* didapatkan dari Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 23.0 windows, menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan indeks pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia; pengeluaran pemerintah sektor pendidikan; pengeluaran pemerintah sektor; pertumbuhan ekonomi; kemiskinan

The effect of government expenditure in education, health, economic growth and poverty on the human development

Abstract

One important component of the quality of economic development is the level of human development as measured by the human development index. The purpose of this study was to determine the effect of government spending on education, health, economic growth, and poverty on the human development index in the Province of D.I. Yogyakarta in 2010–2021. Secondary data in the form of time series data was obtained from the Central Statistics Agency D.I. Yogyakarta and the Directorate General of Fiscal Balance for use in this study. The quantitative method used in this study was multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23.0 windows. Using the Ordinary Least Square (OLS) method. The results show that government spending on education, health, economic growth, and poverty have a joint effect on the human development index in the Province of D.I. Yogyakarta. While partially, government spending on the education sector has a positive and significant effect on the human development index in the Province of D.I. Yogyakarta. Government spending on the health sector does not significantly contribute to the human development index in the province of D.I. Yogyakarta. Economic growth is not significant to the human development index in the Province of D.I. Yogyakarta. Poverty has a significant negative and significant effect on the human development index in the Province of D.I. Yogyakarta.

Key words: *Human development index; education sector government expenditure; sector government expenditure; economic growth; poverty*

Copyright © 2022 Dwi Rahayu Hidayati, Niniek Imaningsih

✉ Corresponding Author

Email Address: dwirahida99@gmail.com

DOI: 10.30872/jfor.v24i4.11875

PENDAHULUAN

Meskipun semua orang ingin hidup sejahtera, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Sektor ekonomi merupakan salah satu cara dalam bidang pembangunan yang dapat dimanfaatkan suatu bangsa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Menurut Adam Smith pada (Ningrum et al, 2020). SDM ialah komponen dari pembangunan ekonomi, dan pembangunan ialah faktor dalam kesejahteraan suatu bangsa, yang menunjukkan pentingnya ukuran dan kualitas manusia. IPM dibangun atas tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator kesehatan ditentukan oleh usia panjang atau tingkat harapan hidup. Sementara rata-rata melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk indikator pendidikan. Sedangkan indikator standar kehidupan layak ditentukan oleh pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli. Tapi UNDP menyempurnakan pendekatan lama dengan pendekatan baru, mengganti salah satu indikator angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah (Ningrum et al., 2020).

Berdasarkan (Rangongo & Ngwakwe, 2019), dengan adanya pendidikan memungkinkan terciptanya ide-ide baru untuk produk, layanan dan teknologi baru. Tentu hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang agresif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, pendidikan saja tidak cukup, perlu juga ditunjang dengan kesehatan yang baik. Menjaga kesehatan yang baik sangat penting untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kedua hal tersebut saling berkaitan karena dibutuhkan fisik dan mental yang kuat untuk menghasilkan manusia yang cerdas (*men insano in corpore sano*). Ketika tubuh bebas dari segala penyakit fisik atau mental dapat dikatakan tubuh dalam keadaan sehat. Tujuan dari kesehatan yang baik adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar dapat mencegah penyakit kronis. Karena kedua komponen tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, maka pemerintah harus mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat, hal ini dapat dilakukan dengan sentuhan anggaran kepada kedua elemen tersebut (Rahim et al, 2021).

Besarnya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua faktor lain yang dianggap signifikan dalam meningkatkan IPM. Tanda keberhasilan pembangunan dilihat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan kualitas hidup merupakan faktor lain yang mencirikan kemiskinan dari segi kualitas hidup (Sinuraya, 2020). Menurut Winarti pada (Invantoro & Efriyenti, 2020) suatu bangsa dianggap maju jika memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat pertumbuhan yang mengarah pada pendapatan minimum yang tidak proporsional, pertumbuhan pengangguran yang lebih besar mengakibatkan tidak ada pendapatan yang diperoleh dan tingkat pendidikan yang rendah, semuanya dapat berkontribusi pada meningkatnya tingkat kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia provinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan menduduki peringkat ke 2 dengan IPM tertinggi diantara 34 provinsi serta masuk pada kategori IPM tinggi. Tentu dengan adanya indeks pembangunan manusia yang semakin baik maka diharapkan pula bahwa tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Kemiskinan pada Provinsi D.I. Yogyakarta menduduki nilai tertinggi jika disamakan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, meskipun setiap tahun tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah indeks pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Begitu pula dengan variabel lainnya seperti apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

METODE

Berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2019) untuk menguji hipotesis yang ditetapkan, metodologi penelitian berbasis filosofi positivism dikenal sebagai penelitian kuantitatif, untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data, dan menganalisis secara statistik.

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut dengan variabel terikat (Sugiyono, 2019). Indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010-2021 dipilih sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Sedangkan (Sugiyono, 2019) menyatakan variabel bebas ialah variabel yang memiliki dampak terhadap variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini meliputi: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I Yogyakarta serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan situs resmi dan publikasi laporan dimana menyediakan informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi: dokumentasi, studi kepustakaan, serta riset internet. Digunakan program komputer software SPSS 23.0 *for windows* untuk membantu menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pendekatan analisis penelitian ini ialah regresi linear berganda. Berikut rumus persamaan regresi linear berganda berdasarkan (Sugiyono, 2019) secara umum dirumuskan menjadi berikut:

$$Y = a + bX$$

Sehingga dalam penelitian ini persamaan regresi linier berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	=	IPM
α	=	Konstanta
β_1	=	Koefisien Regresi X1
β_2	=	Koefisien Regresi X2
β_3	=	Koefisien Regresi X3
β_4	=	Koefisien Regresi X4
X_1	=	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
X_2	=	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
X_3	=	Pertumbuhan ekonomi
X_4	=	Kemiskinan
ϵ	=	Standard Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas untuk memastikan apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas Kolmogorov Smirnov salah satu pengujian yang dapat digunakan. Dasar pengambilan keputusannya yaitu data berdistribusi secara normal jika nilai signifikansi > 0,05.

Tabel 1.
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	12
Asymp.Sig.(2-tailed)	0.882

Merujuk pada hasil olah data uji normalitas melalui model *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, bisa ditinjau dari tabel diatas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,882 atau besarnya melebihi angka 0,05 (> 0,05) maka bisa ditarik simpulan bahwa pada penelitian ini nilai residual dapat dikatakan terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi adalah tujuan dari uji multikolinearitas. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai tolerance (Ghozali, 2018). Bila nilai tolerance > 0,10 tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan bila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, begitu sebaliknya.

Tabel 2.
Hasil Test Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan	Keterangan
X1	0.231	4.335	≤ 10	Bebas multikolinearitas
X2	0.183	5.465	≤ 10	Bebas multikolinearitas
X3	0.872	1.147	≤ 10	Bebas multikolinearitas
X4	0.104	9.606	≤ 10	Bebas multikolinearitas

Berdasarkan tabel diatas, variabel X1 (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan) *tolerance* sebesar 0.231 dan VIF sebesar 4.335, X2 (pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) *tolerance* sebanyak 0.183 dan VIF sebanyak 5.465, X3 (pertumbuhan ekonomi) *tolerance* mencapai 0.872 dan VIF mencapai 1.147, X4 (kemiskinan) *tolerance* sebesar 0.104 sementara untuk VIF sebesar 9.606 Artinya variabel independen memiliki nilai *tolerance* yang melebihi angka (>0.100) sementara nilai VIF lebih kecil dari (<10.00) maka, sehingga di penelitian ini asumsi multikolinieritas sudah terpenuhi atau tidak ditemukan suatu multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) arti penting dari uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya pertidaksamaan antara varian dari pengamatan residual satu ke yang lainnya dalam model persamaan yang digunakan. Penggunaan metode Rank Spearman untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas. Dapat disimpulkan bahwasanya persamaan tersebut terbebas dari heterokedastisitas jika tingkat signifikansi $> 0,05$.

Tabel 3.
Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Korelasi Rank Spearman

Variabel	Sig2-tailed
PPSP	0.812
PPSK	0.931
PE	0.931
KMSKN	0.948
IPM	0.880

Merujuk tabel diatas, dipahami bahwasanya variabel PPSP (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan) nilai signifikansinya mencapai 0.812, PPSK (pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) nilai signifikansinya mencapai 0.931, PE (pertumbuhan ekonomi) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.931, TK (tingkat kemiskinan) nilai signifikansi sebesar 0.948, dan IPM (indeks pembangunan manusia) mempunyai nilai signifikansi hingga 0.880, sehingga seluruh variabel independen mempunyai nilai signifikan lebih dari 0.05 serta bisa disimpulkan bahwasanya di penelitian ini asumsi uji heterokedastisitas telah terpenuhi serta tidak ada temuan heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Penggunaan uji autokorelasi untuk medeteksi ada atau tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (Ghozali, 2018). *Run Test* dapat digunakan untuk uji autokorelasi Uji ini akan menunjukkan apakah ada korelasi yang kuat antara residual. Apabila nilai Asymp.Sig (2-tiled) $\geq 0,05$ menunjukkan bahwasanya tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0.00151
Cases < Test Value	6
Cases $\geq$ Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	6
Z	-0.303
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.762

Merujuk hasil tabel, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* mencapai 0.762 lebih besar dari (> 0.05), sehingga ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemui gejala autokorelasi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Berganda

Menganalisis pengaruh variabel bebas yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat dimanadikenal sebagai regresi linier berganda. Pada pengujian hipotesis ini dibantu menggunakan aplikasi program SPSS (*Statistis Program for Sosial Science*) versi 23 dan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Sehingga diperoleh persamaan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = 85.706 + 5.754E-013X1 + 5.517E-012X2 - 0.021X3 - 0.634X4 + \epsilon$$

Merujuk pada persamaan diatas dapat diambil simpulan:

α = Nilai konstanta bertanda positif yaitu sebesar 85.706 menunjukkan bahwa variabel independen (pengaruh pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan) naik sebanyak satu satuan maka di variabel dependen (IPM) akan ada kenaikan.

X1 = Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) mencapai angka 5.754, maksudnya ialah apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat hingga nilai satu persen maka IPM secara rata-rata akan meningkat hingga 5.754 juta rupiah. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel IPM.

X2 = Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) mencapai angka 5.517, maksudnya adalah jika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan naik hingga nilai satu persen maka IPM secara rata-rata akan mengalami kenaikan sampai 5.517 juta rupiah. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan atas variabel IPM.

X3 = Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (X3) mencapai angka -0.021, maksudnya jika pertumbuhan ekonomi meningkat hingga nilai satu persen pada IPM akan menurun mencapai 0.021 persen. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan atas variabel IPM.

X4 = Koefisien regresi Kemiskinan (X4) mencapai angka -0.634, jika kemiskinan meningkat hingga nilai satu persen pada IPM akan mengalami penurunan mencapai 0.634 persen. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan atas variabel IPM.

Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan buat mengetahui sejauh mana variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen menurut (Ghozali, 2018). Ada dua kemungkinan nilai untuk koefisien determinasi yaitu nol atau satu. Ketika nilainya mendekati satu, variabel independen memiliki hampir semua informasi yang diperlukan untuk meramalkan variabel dependen.

Tabel 5.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.997 ^a	0.994	0.990

Merujuk pada sajian tabel diatas, diketahui dalam penelitian ini memiliki *R square* dalam tabel model summary menjelaskan nilai *R square* yaitu 0.994 artinya dapat dikatakan 99.4 % ke empat variabel bebas/ variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan penduduk serta kemiskinan) dengan bersama – sama bisa memberikan penjelasan atas variabel terikat/ dependen yakni IPM. Sedangkan sisanya 0.6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis F

Penggunaan uji f untuk memastikan apakah variabel independen ada pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka Apabila nilai signifikan $F < 0,05$ maksudnya seluruh variabel independen berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6.

Hasil Uji Hipotesis F		
Model	F	Sig.
1	273.781	.000 ^b

Mengacu pada hasil ang diperoleh nilai signifikansi 0.000 dan nilai F hitung 273.781. Taraf signifikansi pada penelitian ini ialah 5% atau ($\alpha = 0,05$), yg artinya signifikansi $0.00 < 0.05$. Sementara nilai F tabel dimana dan df_2 (*degree of freedom*) = $n-k = 7$, sehingga diperoleh hasil F tabel sebanyak 4.12. Jadi, F hitung 273,781 > F tabel 4,12 sesuai pengambilan keputusan H_a diterima dimana F hitung > F tabel, artinya variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2), pertumbuhan ekonomi (X3), serta kemiskinan (X4) secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yakni indeks pembangunan manusia.

Uji Hipotesis t

Uji t ialah proses analisis regresi berganda yang memiliki tugas menyelidiki apa variabel independen (X) memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen (Y). Sehingga diperoleh hasil uji hipotesis dibawah ini:

Tabel 7.

Hasil Hipotesis Uji t

Model	t-hitung	t-tabel	Sig.
X1 (PPSP)	3.539	2.364	0.009
X2 (PPSK)	2.237	2.364	0.060
X3 (PE)	-0.889	2.364	0.403
X4 (KMSKN)	-6.967	2.364	0.000

Merujuk pada hasil penelitian, buat mengetahui nilai t tabel dilakukan dengan cara menghitung nilai df_2 (*degree of freedom*) = $n-k = 7$ sehingga nilai t tabel sebesar 2.364. Dengan demikian, temuan menerangkan bahwasanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) berpengaruh signifikan dan berhubungan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi (X3) tidak berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan (X4) berpengaruh signifikan serta berhubungan negatif secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Merujuk temuan penelitian diatas nilai koefisien senilai 5.754E-013 menyebutkan ada hubungan positif dengan IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai signifikansi sebanyak 0.009 artinya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1) berpengaruh positif atas nilai IPM yang terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 – 2021. Tiap terjadi penambahan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan mendorong peningkatan presentase IPM Provinsi D.I. Yogyakarta. Apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat hingga nilai satu persen maka IPM secara rata-rata akan meningkat hingga 5.754 juta rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta mengalokasikan dana yg cukup besar setiap tahunnya. Dengan menyediakan infrastruktur pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan kepada semua masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta, anggaran belanja pendidikan yang dianggarkan pemerintah daerah digunakan untuk program – program yg tepat agar memiliki dampak nyata terhadap IPM. Selain itu cara lainnya yang mampu pemerintah lakukan untuk meningkatkan pendidikan adalah mengalokasikan sekecil-kecilnya 20 persen berasal dari jumlah belanja daerah untuk pendidikan.

Penelitian ini selaras dengan Deni Invarianto dan Dian Efriyenti bahwasana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sesuai dengan teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya pemerintah dalam menaikkan indeks pembangunan manusia dana mendorong penelitian dalam pengembangan buat meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya bisa ditinjau dengan melakukan investasi bidang pendidikan akan bisa menaikkan kualitas sumber daya manusia yg diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan serta keterampilan seseorang. Selama ada sumber daya manusia yg cerdas dan produktif, kemiskinan akan berkurang, dimana akan menaikkan indeks pembangunan manusia.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Sesuai hasil penelitian diatas nilai koefisien sebesar 5.517E-012 menerangkan terdapat hubungan positif dengan IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai signifikansi sebesar 0.060 artinya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan atas nilai IPM yg ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 – 2021. Bila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkat hingga nilai satu persen maka IPM secara rata-rata akan menurun hingga 5.517 juta rupiah.

Pengeluaran belanja pemerintah bidang kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta meningkat meskipun tidak berdampak nyata terhadap indeks pembangunan manusia diobjek penelitian tahun 2010-2021. Hal ini terjadi karena anggaran kesehatan pemerintah tidak mendapatkan lima persen dari APBN di luar gaji seperti yang dipersyaratkan oleh UU No 36 tahun 2009. Presentase APBD yang dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 10 persen, namun pengeluaran kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010-2021 kurang dari 10 persen.

Penelitian ini selaras dengan Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita. Muliza mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Ini adalah hasil ketergantungan anggaran yang terus menerus pada pengeluaran untuk tujuan kuratif (penyembuhan) daripada preventif (pencegahan). Terlepas dari kenyataan bahwa alokasi anggaran terus semakin tinggi, tetapi masih ada beberapa kabupaten/kota yg memakai dana kesehatan yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak memungkinkan untuk mendongkrak nilai IPM secara signifikan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Mengacu pada hasil analisis diatas nilai koefisien sebesar -0.021 mengungkapkan ada hubungan negatif dengan IPM pada Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai signifikansi sebesar 0.403 maksudnya pertumbuhan ekonomi (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan atas nilai IPM yang ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 – 2021. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat hingga nilai satu persen (%) maka IPM secara rata-rata akan menurun sampai 0.021 persen.

Kesejahteraan manusia dan pembangunan dirasa adil apabila penduduk menikmati hasil dari pembangunan, dalam hal ini distribusi pendapatan memainkan peran penting. Potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan pemerataan pendapatan yang baik. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemiskinan dan tingkat pendidikan serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja dengan adanya pemerataan pendapatan yang baik. Karena distribusi pendapatan yang tidak merata di seluruh masyarakat, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak kecil. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi D. I. Yogyakarta memberikan dampak kecil terhadap kenaikan IPM.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi belum menjangkau semua sektor. Selaras dengan penelitian (Ningrum et al., 2020) pertumbuhan ekonomi belum menjangkau semua sektor terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap sektor penting oleh UNDP. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan hal yang bersifat multi dimensi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia.

IPM disuatu daerah akan meningkat akibat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana akan meningkat pula pendapatan perkapita masyarakat. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta memberikan pengaruh yang kecil terhadap kenaikan IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Fatimah dimana pertumbuhan ekonomi, memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Maksudnya pertumbuhannya mengalami fluktuatif sehingga kurang memberi peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu ini memiliki dampak dalam menurunnya pendapatan perkapita masyarakat. Rendahnya pendapatan daerah membuat rendah pula harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang dapat menyerap tenaga kerja baru.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian diatas nilai koefisien sebesar -0.634 menjelaskan ada hubungan negatif dengan IPM di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan signifikansi senilai 0.000 artinya kemiskinan (X4) berpengaruh negatif atas nilai IPM yg ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010 – 2021. Tiap terjadi penurunan kemiskinan akan mendorong peningkatan presentase dari IPM Provinsi D.I. Yogyakarta. Bila terjadi peningkatan kemiskinan maka akan menurunkan nilai IPM hingga 0.634 persen artinya setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan persentase IPM di di Provinsi D. I. Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk miskin yang besar membuat masyarakat tidak dapat memenuhi pekerjaannya. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dan tenaga yg ada buat pemenuhan kebutuhan dasar dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa pun yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Karena orang miskin memiliki daya beli yang rendah, pertumbuhan populasi penduduk miskin akan menghambat pembangunan manusia.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Jahtu Widya Ningrum dan Aziza Hanifa Khairunnisa, serta Nurul Huda yang menemukan bahwa kemiskinan berdampak negative dan signifikan terhadap IPM. Karena orang miskin hanya mempertimbangkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, mereka tidak mempertimbangkan pendidikan atau kesehatan mereka sendiri yang

mana akan memberikan dampak pada sumber daya manusia dan akan mengakibatkan pengangguran semakin tinggi.

SIMPULAN

Mengacu pada temuan yang dilakukan di atas, maka bisa diketahui bahwa variabel independen Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X4), serta Kemiskinan (X4) mampu menerangkan variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia sebesar 99.4 %. Sedangkan sisanya sebesar 0.6 % dijelaskan oleh variabel – variabel lain yg tak diteliti pada penelitian ini

Secara simultan, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X4), serta Kemiskinan (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y). Sedangkan secara parsial, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X4) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif, dan variabel Kemiskinan (X4) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. (n.d.). Retrieved July 25, 2022, from <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/1170/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2021.html>
- Fatimah, S.N. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6268>
- Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Invantoro, D., & Efriyenti, D. (2019). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Muliza, M., Zulham, T., Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1). <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Rahim et al. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3).
- Rangongo, M., & Ngwakwe, C. (2018). Human Capital Investment and Economic Growth: A Test of Endogenous Growth Theory in Two Developing Countries. *Acta Universitatis Danubius. Economica*, 15(1).
- Sinuraya, marisa B. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ipm Di Provinsi Sumatera Utara. *JEpa*, 5(2). <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/909>
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26). In Bandung: CV Alfabeta.